KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Polemik Gedung Baru DPR: Dewan Berkukuh Bangun Megaproyek
Tanggal : Selasa, 18 Agustus 2015
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 8

POLEMIK GEDUNG BARU DPR

Dewan Berkukuh Bangun Megaproyek

Jokowi tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru DPR.

Mahardika Satria Hadi
mahardika@tempo.co.id

TEMPO/TONY HARTAWAN



Maket gedung baru DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat melanjutkan rencana pembangunan kompleks gedung baru. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Roem Kono, berharap tahapan awal pembangunan gedung bisa segera dimulai tahun ini. "Kapan lagi kita mulai? Sampai sepuluh tahun lagi enggak dimulai," ujar dia saat dihubungi, kemarin.

Roem menilai kompleks gedung parlemen yang ada saat ini sudah tidak layak huni. Menurut dia, tempat bekerja para wakil rakyat di kawasan Senayan tersebut kini ditempati sekitar 6.000 orang. Padahal kapasitas gedung hanya 800 orang. "Bisa bahaya nanti. Kalau itu reboh *gimana* kita," ujar politikus Partai Golkar ini.

DPR kembali menyetujui rencana pembangunan gedung baru pada Februari lalu. Gedung utama untuk ruang anggota dan tenaga ahli bakal dilengkapi fasilitas alun-alun, museum, perpustakaan, pusat kunjungan parlemen, pusat kajian legislasi, serta kawasan permukiman. Nilai total anggaran untuk proyek ini mencapai Rp 1,2 triliun, yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan APBN 2016.

Rencana pembangunan gedung baru DPR menuai pro-kontra sejak digagas pada 2009. Semula Dewan merencanakan pembangunan didanai Rp 1,1 triliun pada 2011. Gedung 36 lantai itu nantinya dilengkapi fasilitas *helipad*, kamar tidur, dan kolam renang. Namun belakangan rencana itu ditunda karena menuai protes keras dari masyarakat.

Roem mengatakan gedung baru DPR merupakan bagian dari rencana strategis parlemen hingga 2019. "Kami harus perbaiki citra, transparansi, dan perlu sarana dan prasarana memadai, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat," katanya.

Menurut Roem, tidak ada yang istimewa dengan rencana pembangunan gedung baru DPR. Ia mengaku heran terhadap maraknya reaksi penolakan dari sebagian elemen masyarakat. "Lembaga-lembaga tinggi negara yang lain sudah membangun gedung, kenapa kami menjadi masalah?" ujarnya. "Ini biasa saja, tidak ada yang luar biasa."

Ketua Badan Anggaran DPR, Ahmadi Noor Supit, mengaku belum mengecek apakah mata anggaran pembangunan gedung baru telah dimasukkan ke RABPN 2016 dan nota keuangan 2016. Namun ia yakin pemerintah telah mengakomodasi keinginan Dewan. "Ini semua kan sebelumnya memang sudah ada. Di APBN-P kemarin juga sudah ada," kata dia.

Hingga kemarin, pemerintah belum menentukan sikap ihwal rencana pembangunan gedung baru DPR. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pembahasan anggaran belum sampai pada Satuan III, yang memuat rincian program. "Kalau sudah lihat, ya, baru bisa komentar," kata dia kemarin.

Namun, pada Jumat pekan lalu, Presiden Joko Widodo tidak bersedia menandatangani prasasti pembangunan gedung baru DPR seusai acara pembacaan pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan. "Beliau kalau belum tanda tangan kan pasti masih ada yang dipertimbangkan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ahad lalu.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan DPR sebaiknya membangun *budget office* serta mengaktifkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara guna menunjang kinerja. "Tidak kemudian mengalokasikan gedung DPR yang tidak urgen."

● MAHARDIKA | TRI ARTINING PUTRI | ANANDA TERESIA

Yang Lebih Mendesak daripada Gedung

Di sejumlah negara, anggota Dewan, Kongres, maupun Senat tidak bekerja sendiri. Agar tampil optimal, para wakil rakyat itu dibantu oleh *parliamentary budget office*— semacam badan atau lembaga pendukung untuk menopang fungsi parlemen dalam sistem anggaran negara.

Negara-negara maju telah menerapkan *budget office* dalam lembaga legislatif mereka, seperti Kanada, Australia, dan Austria. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Filipina adalah dua negara dengan parlemen yang dilengkapi *budget office*.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya juga mengadopsi *budget office* untuk mendukung fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan. "Semacam kantor yang berisi semua tenaga ahli DPR. Mereka berdiskusi di situ," kata dia saat dihubungi, kemarin.

Yenny menilai *budget office* akan lebih efektif mendongkrak kinerja para anggota Dewan ketimbang gedung baru. Dengan adanya *budget office*, semua tenaga ahli akan terkonsentrasi di satu tempat untuk membahas masukan yang cepat, akurat, dan menyeluruh tentang pelbagai isu terkait dengan tiga fungsi parlemen. "Kerjanya kelihatan dan tidak parsial dalam memberikan *support* kepada setiap anggota DPR," ujarnya.

Meski terbukti efektif di parlemen beberapa negara, *budget office* tampaknya belum akan mampir di DPR. Jangankan membentuk *budget office*, DPR justru menghapus keberadaan Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN). BAKN dicoret dari daftar alat kelengkapan Dewan saat pembahasan revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD tahun lalu.

Yenny mendorong DPR mengaktifkan kembali BAKN karena berperan vital untuk membangun transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. BAKN juga berwenang mengawasi dan mengevaluasi kementerian serta lembaga. "Bisa memanggil kementerian atau lembaga jika dianggap agak menyimpang dalam penganggaran," ujarnya.

Di Senayan, *budget office* justru lebih dulu ada di Dewan Perwakilan Daerah. Dalam strukturnya, Ketua Budget Office DPD dibantu oleh bagian sekretariat; pusat informasi; keseimbangan kebijakan ekonomi makro dan mikro; perpajakan dan retribusi; keserasian APBN dan APBD serta pengawasan anggaran; dan anggaran perkembangan otonomi daerah.

● MAHARDIKA | BERBAGAI SUMBER

Pasang-Surut Gedung Baru

Usulan pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat berawal pada 2009. Ketika itu Sekretariat Jenderal DPR menyodorkan konsep gedung berbentuk huruf "U" terbalik. Sempat ditolak Tim Peningkatan Kinerja DPR, ide ini belakangan disetujui oleh anggota dan pimpinan Dewan.

FEBRUARI 2009
Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan konsultan membuat rencana induk kompleks parlemen.

JANUARI 2010
Ketua DPR Marzuki Alie memperoleh gambaran lengkap rencana gedung baru.

11 MARET 2011
Biaya pembangunan ditetapkan Rp 1,138 triliun.

14 APRIL 2011
Empat BUMN dinyatakan lolos pra-kualifikasi lelang pembangunan gedung baru.

9 MEI 2011
Evaluasi Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan rencana pembangunan "hanya" Rp 777 miliar. Kolam renang adalah salah satu fasilitas yang dihapus.

23 MEI 2011
Marzuki Ali membatalkan rencana pembangunan gedung baru karena diprotes publik. Keputusan diambil setelah berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

2 NOVEMBER 2014
Usulan gedung baru muncul lagi setelah Ketua Komisi Pertahanan DPR, Mahfudz Siddiq, menyatakan anggota Dewan kekurangan ruangan untuk menunjang kerja.

12 FEBRUARI 2015
Desain utama penataan fisik gedung DPR masuk komponen penambahan anggaran DPR yang diusulkan Badan Urusan Rumah Tangga. Totalnya mencapai Rp 1,6 triliun.

20 MEI 2015
DPR memastikan akan membangun gedung baru dengan sejumlah fasilitasnya. Nilai total untuk proyek ini sebesar Rp 1,2 triliun, dialokasikan dari APBN-P 2015 dan APBN 2016.

GONTI-GANTI HITUNGAN

8 Mei 2010
Biaya: Rp 1,8 triliun
Luas: 156 ribu meter persegi
Biaya tiap meter persegi: Rp 10,9 juta

1 September 2010
Biaya: Rp 1,6 triliun
Jumlah lantai: 36 lantai

29 Maret 2011
Biaya: Rp 1,138 triliun
Jumlah lantai: 36 lantai
Biaya tiap meter persegi: Rp 7.269.000

10 Mei 2011
Biaya: Rp 777 miliar
Jumlah lantai: 26 lantai

● MAHARDIKA | EVAN PDAT | SUMBER DIOLAH TEMPO